

NOTULEN

RAPAT KERJA BAPEMPERDA BERSAMA DENGAN BIRO ORGANISASI DAN BIRO HUKUM SETDAPROVSU TERKAIT PEMBAHASAN RANPERDA TERHADAP PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

TANGGAL, 23 MEI 2025

A. DASAR.

SURAT KETUA DPRD SUMATERA UTARA NO : 1100/213/Sekr. DPRD/VI/2025
TANGGAL 21 MEI 2025 PERIHAL PENUGASAN INSTANSI TERKAIT.

B. PELAKSANAAN.

HARI : JUMAT
TANGGAL : 23 MEI 2025
PUKUL : 14.30 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT BANMUS LANTAI I KANTOR DPRD SUMUT
AGENDA : TERKAIT PEMBAHASAN RANPERDA TERHADAP PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA PESERTA RAPAT

C. PESERTA RAPAT

- BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU,
- BIRO HUKUM SETDAPROVSU,

D. JALANNYA RAPAT

1. RAPAT DIBUKA OLEH ANGGOTA BAPEMPERDA DPRD SUMATERA UTARA TEPAT PADA PUKUL 13.30 WIB.
2. PERKENALAN DAN PENGANTAR OLEH WAKIL KETUA BAPEMPERDA DPRD SUMATERA UTARA BAPAK THOMAS DACHI.
3. SELANJUTNYAWAKIL KETUA BAPEMPERDA BAPAK THOMAS DACHI MEMULAI MEMIMPIN RAPAT.
4. PENJELASAN PESERTA RAPAT DAN DINAS TERKAIT :

RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, DILAKUKAN UNTUK MENUJU STRUKTUR ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN, SEBAGAI

IMPLEMENTASI DARI PRINSIP EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. TENTUNYA RANPERDA INI AKAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK MENINGKATKAN PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK. SESUAI TUJUAN ESENSIAL YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA DAN UUD 1945 SEBAGAI DASAR FILOSOFIS KEBANGSAAN KITA

UNTUK MEMENUHI KETENTUAN DALAM ATURAN PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN MAKA RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA **SETIDAKNYA** HARUS MENGACU DAN BERPEDOMAN KEPADA :

1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
2. UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERITAHAN DAERAH.
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH.

HAL TERSEBUT DILAKUKAN UNTUK MENGHINDARI PERTENTANGAN MATERI MUATAN YANG DIATUR DALAM (RANCANGAN) PERATURAN DAERAH DIMAKSUD DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TINGKATANNYA LEBIH TINGGI YANG DAPAT MENAKIBATKAN TERJADINYA PEMBATALAN KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ITU SENDIRI.

BIRO ORGANISASI

TERKAIT MASUKAN DARI PIMPINAN BAPEMPERDA DARI BEBERAPA DINAS YANG DISAMPAIKAN, SEGERA KAMI SEBAGAI BIRO ORGANISASI AKAN SEGERA MENYAMPAIKANNYA KEPADA GUBERNUR UNTUK DIBAHAS, SEPERTI PEMISAHAN BINA MARGA DENGAN PSDA, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERKEBUNAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP AKAN DIGABUNGAN KE DINAS PENDIDIKAN.

E. KESIMPULAN RAPAT

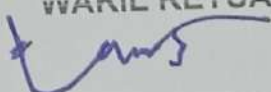
MASUKAN DARI PIMPINAN BAPEMPERDA DARI BEBERAPA DINAS YANG DISAMPAIKAN, DIMOHON UNTUK DAPAT JAWABAN DARU GUBERNUR, SEBAGAI BIRO ORGANISASI AKAN SEGERA MENYAMPAIKANNYA KEPADA HASIL DAN PEMBAHASANA DENGAN GUBERNUR, BAIK SECARA ARGUMENTATIF MAUPUN KEBUTUHAN MASYARAKAT PROPINSI SUMATERA UTARA, SEPERTI PEMISAHAN BINA MARGA DENGAN PSDA, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERKEBUNAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP AKAN DIGABUNGAN KE DINAS PENDIDIKAN.

ALASAN LAIN DALAM PSDA TERSEBUT DAIATSN YAITU BAHWASANNYA DI SUMATERA UTARA MEMILIKI 11 WILAYAH SUNGAI YANG TERSEBAR DI SELURUH PROPINSI SUMATERA DAN YAG TERLUAS DI INDONESIA, SERETA JARINGAN IRIGASI SEBANYAK 71 YANG HARUS DI BAWAH 1 DINAS,

F. PENUTUP

DEMIKIAN RAPAT KERJA BAPEMPERDA DENGAN OPD INI DILAKSANAKAN, DAN RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 16.30 WIB OLEH PIMPINAN RAPAT BAPEMPERDA DPRD SUMATERA UTARA.

**BAPEMPERDA
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
WAKIL KETUA,**


THOMAS DACHI,SH.MH

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(BAPEMPERDA) DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
FOTO RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KEPALA BIRO ORGANISDASI
SETDAPROVSU DAN KEPALA BIRO HUKUM SETDAPROVSU
TANGGAL 23 MEI 2025



